

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN DAN POKMAS LIPAS INSAN RESIDIVIST

Mahmuddin¹, Andika Chandra², Servatius Nicholas Pinem³^{1,2,3}Politeknik Pengayoman IndonesiaE-mail: mahmudd2828@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan serta Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Insan Residivist dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi Klien Pemasyarakatan, khususnya mantan narapidana residivis. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji struktur kelembagaan, fungsi, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas Kelas I Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas utama dalam melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien dewasa maupun anak, dengan dukungan struktur organisasi yang lengkap dan fasilitas yang memadai. Sementara itu, Pokmas Lipas Insan Residivist berperan sebagai mitra strategis yang fokus pada pemulihan sosial, ekonomi, dan spiritual bagi mantan narapidana. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini adalah pendirian Griya Abhipraya "Kedan Kita", sebuah rumah singgah dan pusat pembinaan berbasis keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Bapas dan Pokmas mampu memberikan pendekatan pembinaan yang lebih holistik, mendorong kemandirian klien, serta menurunkan potensi residivisme. Dengan demikian, model integratif seperti ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemasyarakatan yang humanis dan inklusif.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Pokmas Lipas, Residivis, Reintegrasi Sosial, Griya Abhipraya, Keadilan Restoratif.

Abstract

This study aims to describe the role of the Medan Class I Correctional Center (Bapas) and the Community Group for Correctional Care (Pokmas Lipas) Insan Residivist in supporting the social reintegration process for Correctional Clients, especially former recidivist inmates. Through a qualitative descriptive approach, this study examines the institutional structure, functions, and collaboration between government agencies and civil society in out-of-prison guidance efforts. As a Technical Implementation Unit of the Ministry of Law and Human Rights, the Class I Correctional Center of Medan has the primary task of providing guidance, supervision, and assistance to both adult and child clients, supported by a comprehensive organizational structure and adequate facilities. Meanwhile, Pokmas Lipas Insan Residivist acts as a strategic partner focused on social, economic, and spiritual recovery for former inmates. One concrete manifestation of this collaboration is the establishment of Griya Abhipraya "Kedan Kita", a halfway house and restorative justice-based guidance center. The results of the study

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 479

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/krepa.v1i2.365

Copyright : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

indicate that the synergy between Bapas and Pokmas is able to provide a more holistic guidance approach, encourage client independence, and reduce the potential for recidivism. Thus, this integrative model is a strategic step in realizing a humanistic and inclusive correctional system.

Keywords: *Correctional Center, Lipas Community Group, Recidivism, Social Reintegration, Griya Abhipraya, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekip) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk mencetak sumber daya manusia profesional, berintegritas, dan kompeten dalam bidang pemasyarakatan. Dalam upaya membentuk kader pemasyarakatan yang tidak hanya unggul secara akademis namun juga adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan, Poltekip menerapkan kurikulum vokasi yang menekankan pada praktik langsung melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau yang dikenal dengan istilah Intervensi Makro.

Kegiatan KKN ini menjadi bagian integral dari proses pendidikan bagi Taruna Tingkat III dan dilaksanakan selama satu bulan dua puluh hari di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para taruna dapat mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah secara langsung di lapangan, serta memahami realitas sosial dan kelembagaan yang akan mereka hadapi ketika telah menjadi petugas pemasyarakatan di masa mendatang.

Salah satu lokasi pelaksanaan KKN Intervensi Makro adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, yang merupakan UPT Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan, yaitu individu baik dewasa maupun anak yang sedang berada dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah bertransformasi dari sistem yang berorientasi pada hukuman menjadi sistem yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses reintegrasi ini bertujuan agar Klien Pemasyarakatan dapat diterima kembali di tengah masyarakat, menjalani kehidupan yang produktif, serta tidak kembali melakukan tindak pidana (residivisme). Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa proses ini tidak berjalan mulus. Hambatan seperti stigma negatif, diskriminasi sosial, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial sering kali menjadi penghalang bagi keberhasilan reintegrasi sosial.

Dalam konteks tersebut, pendekatan intervensi makro menjadi sangat relevan. Intervensi makro adalah upaya yang menyasar sistem sosial secara menyeluruh, dengan melibatkan komunitas, institusi, dan kebijakan, guna menciptakan perubahan struktural dan kultural yang mendukung reintegrasi Klien Pemasyarakatan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Taruna Poltekip ditugaskan untuk melakukan pendekatan sosial berbasis komunitas yang mencakup edukasi, pemberdayaan, hingga kolaborasi multipihak.

Kegiatan intervensi makro di Bapas Kelas I Medan tidak hanya dilakukan oleh taruna dan petugas pemasyarakatan, tetapi juga menggandeng Pokmas Lipas Yayasan Anugerah Insan Residivist, sebuah komunitas peduli pemasyarakatan yang berperan dalam advokasi dan pendampingan Klien Pemasyarakatan di Sumatera Utara. Bersama-sama, para pihak melaksanakan program yang mengambil topik: "Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pelatihan Bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Medan"

Topik ini mencakup dua fokus utama. Pertama, menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat dan Klien Pemasyarakatan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Kedua,

memberikan pelatihan keterampilan (khususnya di bidang perkopian/barista) kepada Klien Pemasarakatan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kemandirian. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi penguatan jejaring sosial, peningkatan kepercayaan diri klien, serta terbentuknya ruang kolaboratif antara masyarakat dan institusi pemasarakatan untuk mendukung reintegrasi sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses intervensi makro yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika sosial, peran aktor, dan dampak kegiatan terhadap proses reintegrasi Klien Pemasarakatan ke masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bapas Kelas I Medan dan berlangsung selama 1 bulan 20 hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni hingga 30 Juli 2025. Subjek dalam penelitian ini meliputi Klien Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), masyarakat sekitar, serta mitra strategis seperti Pokmas Lipas Yayasan Anugerah Insan Residivist. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan kegiatan intervensi sosial berupa sosialisasi bahaya narkoba dan pelatihan keterampilan barista sebagai bentuk pemberdayaan Klien Pemasarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, wawancara kepada Klien Pemasarakatan, petugas pemasarakatan, dan mitra kerja, serta studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan data dukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas pelaksanaan intervensi sosial dalam mendukung proses reintegrasi Klien Pemasarakatan serta memperkuat peran komunitas dan lembaga pemasarakatan dalam mendorong perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap inisiasi sosial menjadi langkah awal dalam pelaksanaan intervensi makro yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Kegiatan ini mencakup pengenalan wilayah, pemetaan komunitas, serta penjajakan mitra kerja seperti Pokmas Lipas, LSM, tokoh masyarakat, dan institusi pemerintahan setempat. Hasil dari proses ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap edukasi dan pemberdayaan Klien Pemasarakatan, khususnya yang berkaitan dengan bahaya narkoba dan keterampilan hidup produktif pasca-pembebasan.

1. Inisiasi Sosial

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba menjadi salah satu program yang dinilai relevan, mengingat sebagian besar Klien Pemasarakatan memiliki latar belakang kasus penyalahgunaan zat. Selain itu, pelatihan keterampilan barista dipilih sebagai bentuk konkret pemberdayaan ekonomi, yang mendapat dukungan penuh dari Yayasan Anugerah Insan Residivist.

2. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial dilakukan dengan menyatukan potensi berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, telah dibentuk kelompok kerja yang melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pokmas Lipas, dan Taruna. Kelompok ini bertugas untuk menyusun peran dan strategi intervensi yang kolaboratif. Koordinasi lintas sektor juga dijalankan, antara lain dengan Lapas, Dinas Sosial, serta mitra usaha, guna memastikan keberlanjutan program pelatihan pasca-kegiatan. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi kunci penting dalam mendorong keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan.

3. Asesmen Sosial

Asesmen dilakukan dalam dua bentuk, yaitu asesmen komunitas dan asesmen kebijakan. Melalui asesmen komunitas, diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar masih memiliki pandangan negatif terhadap Klien Pemasarakatan. Stigma ini menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial. Sedangkan dari asesmen kebijakan, ditemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung proses reintegrasi, pelaksanaannya masih belum optimal di lapangan, terutama dalam hal pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan klien.

4. Perencanaan Sosial

Hasil asesmen menjadi dasar dalam merumuskan rencana kegiatan. Taruna bersama mitra kerja menyusun program intervensi yang adaptif dan partisipatif. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan Klien Pemasarakatan secara langsung agar kebutuhan dan minat mereka dapat terakomodasi, khususnya dalam pemilihan jenis pelatihan kerja. Perencanaan kebijakan juga diangkat sebagai bagian dari rekomendasi jangka panjang, khususnya dalam bentuk saran terhadap protokol pembimbingan pasca-pidana yang lebih responsif dan berbasis komunitas.

5. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi komunitas dilaksanakan dalam bentuk dua program utama: (1) Sosialisasi Bahaya Narkoba, yang bertujuan meningkatkan kesadaran Klien Pemasarakatan dan masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba; dan (2) Pelatihan Barista, yang memberikan keterampilan praktis bagi Klien Pemasarakatan untuk mempersiapkan kehidupan mandiri pasca-pembebasan. Kegiatan ini melibatkan pendampingan sosial oleh PK dan Taruna. Klien mendapatkan penguatan moral, motivasi, serta pelatihan teknis dari instruktur profesional yang disediakan oleh yayasan mitra. Evaluasi awal menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta pelatihan, meskipun partisipasi dari masyarakat masih terbatas.

Intervensi kebijakan juga dilakukan melalui promosi media dan public hearing. Taruna turut menyebarkan informasi kegiatan kepada klien saat wajib lapor serta mendukung penyelenggaraan forum dialog terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya dukungan sosial bagi eks-narapidana.

6. Evaluasi Program

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi makro berjalan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri Klien Pemasarakatan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan kerja masih rendah. Diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui jenis pelatihan yang diminati serta faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi.

7. Terminasi dan Rujukan Sosial

Terminasi dilakukan setelah intervensi dinilai mencapai tujuan, dengan penekanan pada transisi yang terencana. Sebagian Klien Pemasarakatan yang menunjukkan ketertarikan dan potensi dalam bidang barista dirujuk untuk mendapatkan pelatihan lanjutan melalui mitra kerja yang telah teridentifikasi. Proses ini memastikan keberlanjutan dukungan terhadap Klien Pemasarakatan meskipun pendampingan formal telah berakhir.

KESIMPULAN

Pelaksanaan praktikum bimbingan kemasyarakatan makro di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai tahapan strategis serta kolaborasi multipihak. Tahap inisiasi sosial menjadi fondasi awal dalam membangun pemahaman terhadap kondisi komunitas dan kebutuhan Klien Pemasarakatan. Kegiatan seperti pengenalan wilayah, pemetaan sosial, serta sosialisasi bahaya narkoba dan pelatihan keterampilan (seperti pelatihan barista) menunjukkan bahwa pendekatan kreatif dan berbasis potensi lokal sangat penting dalam menanamkan nilai positif dan kemandirian bagi klien. Pada tahap pengorganisasian sosial, peran aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah dikonsolidasikan untuk membentuk jejaring sosial yang mendukung proses

reintegrasi. Hal ini memperkuat kesadaran kolektif dan mendorong pengurangan stigma terhadap mantan narapidana. Asesmen sosial yang dilakukan baik terhadap komunitas maupun kebijakan memperjelas bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan sosial dan keberpihakan kebijakan terhadap pemulihan sosial mantan narapidana. Kegiatan ini membantu merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Melalui perencanaan sosial, disusun program-program berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan komunitas maupun rancangan kebijakan yang berpihak kepada Klien Pemasarakatan. Pendekatan ini mendorong adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mendukung proses kemandirian klien. Pada tahap pelaksanaan intervensi, berbagai strategi dilaksanakan baik dalam bentuk intervensi komunitas (pengembangan masyarakat dan pendampingan sosial) maupun intervensi kebijakan (promosi media dan public hearing). Ini menunjukkan bahwa intervensi harus menyentuh dua sisi sekaligus: masyarakat dan sistem. Evaluasi mengungkapkan bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menarik minat masyarakat terhadap program pelatihan kerja yang telah disediakan. Ini menunjukkan perlunya riset lanjutan untuk memahami kebutuhan dan preferensi klien serta hambatan yang mereka hadapi. Tahap terminasi dan rujukan sosial menjadi penutup yang penting, menandai berakhirnya pendampingan formal namun tetap memastikan adanya keberlanjutan dukungan melalui rujukan ke lembaga terkait. Ini memperkuat bahwa reintegrasi sosial adalah proses panjang yang memerlukan dukungan lintas sektor secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, praktikum ini menegaskan pentingnya sinergi antara petugas pemasarakatan, taruna, masyarakat, dan lembaga lain dalam menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi Klien Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Panduan Praktik Bimbingan Kemasyarakatan dan Pendampingan Klien. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Soetomo. (2013). *Pembangunan Masyarakat: Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Refika Aditama.
- Yayasan Anugerah Insan Residivist. (2024). *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Barista bagi Klien Pemasarakatan*. Medan: Internal Report.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Balai Pemasarakatan (Bapas)*. Jakarta: Ditjen PAS.
- Nasution, A. Z. (2020). *Reintegrasi Sosial Narapidana: Tantangan dan Peluang di Indonesia*. Medan: Penerbit Bina Media.